

Resiliensi Kesejahteraan Petani melalui Optimalisasi Diversifikasi Tanam: Studi Kasus Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung

Risky Kusuma Hartono, Fita Ristiana, Aryana Satrya, Renny Nurhasana, Fadhilah Rizky Ningtyas, Salsabila Nadya, Isranalita Madelif Sihombing

Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia (PKJS-SKSG UI)



Pendahuluan

Petani tembakau yang kurang sejahtera menjadi isu global, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan petani tembakau terbanyak di dunia setelah China (Lenchuca et al., 2022). Di Indonesia, petani yang menanam tembakau saja terbukti mengalami penurunan penghasilan dibandingkan dengan petani yang menanam non-tembakau (Sahadewo et al., 2021). Misalnya di Lombok, keuntungan petani mitra hanya sebesar Rp3.975.379 per hektar per musim tanam, atau Rp795.075 per bulan. Keuntungan semakin kecil ketika petani tidak bermitra dan luas lahan tembakau semakin rendah (Nurjihadi et al., 2016). Cara untuk meningkatkan penghasilan petani dengan meningkatkan produktivitas lahan, salah satunya melalui diversifikasi tanam. Peningkatan keanekaragaman lahan pertanian tembakau dengan tumpang sari jagung, tebu, kentang, gandum, dan kacang panjang dapat meningkatkan hasil panen hingga 85,7% (Mango et al., 2018). Selain itu, diversifikasi tanam semakin berperan penting sebagai strategi menghadapi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pertanian, mitigasi risiko, dan meningkatkan stabilitas pendapatan terutama pada sektor petani kecil (Ahsan et al., 2022; Kujawska, 2021).

Diversifikasi tanam menjadi salah satu bentuk pengembangan ekonomi dan pengendalian rokok secara berkelanjutan menurut *Article 17 of the Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Di Indonesia sendiri sebagian besar petani tembakau menerapkan diversifikasi tanam melalui rotasi tanam dan tumpang sari tanaman pangan (Damanhuri et al., 2017; Wijayani & Nanik, 2018). Rotasi tanaman dilakukan ketika musim penghujan dengan menanam berbagai tumbuhan, seperti padi, jagung, umbi, dan berbagai tanaman lainnya, sedangkan memasuki

musim kemarau petani menanam tembakau. Pemerintah Daerah telah mengadakan kegiatan Pengembangan Usaha Tani melalui diversifikasi tanam, namun kegiatan tersebut masih memerlukan partisipasi aktif dan pemahaman petani mengenai keuntungan dan kerugian dalam penerapannya di lahan mereka (Arfianto, 2012). Diversifikasi tanam masih menghadapi tantangan ketidakpastian pasar sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah (Appau et al., 2019). Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) telah digunakan untuk bantuan diversifikasi tanam, tetapi masih terkendala dengan belum adanya petunjuk teknis baku dari pemerintah pusat dan pengajuannya memerlukan proposal dari para petani (Ratih et al., 2021).

Kabupaten Temanggung merupakan daerah sentra tembakau yang menerapkan diversifikasi tanam. Sebagian petani tembakau juga telah mendapatkan DBH CHT untuk diversifikasi tanam pada tahun 2022 (Ahsan et al., 2022). Sejak tahun 2021, luas lahan tembakau di Kab. Temanggung mengalami penurunan, sedangkan luas lahan untuk tanaman pangan, seperti cabai, mengalami peningkatan (Dinas Pertanian Kab. Temanggung, 2023). Walaupun sebagian petani tembakau telah menerapkan diversifikasi tanam, namun mereka masih berpotensi menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi, diantaranya pemilihan jenis tanaman diversifikasi dan hambatan potensial *market* pasca panen. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya diversifikasi tanam yang optimal dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung.



Metodologi

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Data didapatkan dari empat kecamatan sentra tembakau di wilayah pegunungan yang memiliki banyak hambatan untuk menerapkan diversifikasi tanam, yaitu Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Jumprit, dan Kecamatan Ngadirejo. Studi ini dilakukan pada Mei sampai September 2023.

Informan dari studi ini melibatkan petani tembakau, kelompok tani, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Kriteria petani diantaranya berusia lebih dari 18 tahun, telah menanam tembakau lebih dari 5 tahun, dan telah melakukan diversifikasi tanam. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada petani tembakau, kelompok tani, dan pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan observasi langsung

ke lahan petani. Proses *snowball sampling* dilakukan untuk mengumpulkan data kelompok tani yang pernah atau sedang menjabat menjadi pengurus kelompok tani. Sedangkan *focus group discussion* (FGD) dilakukan dengan pemerintah pusat. Data dianalisis dengan triangulasi sumber, penjelasan detail manfaat diversifikasi tanam, dan potensial *market*-nya.



Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Pendorong Petani untuk Menerapkan Diversifikasi Tanam

Petani tembakau tetap mempertahankan menanam tembakau karena sudah menjadi budaya yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang. Petani merasa bahwa tembakau merupakan tanaman yang paling cocok ditanam saat musim kemarau. Petani menerapkan diversifikasi tanam tanpa meninggalkan tembakau walaupun masih terdapat tantangan dan hambatan dalam penerapannya.

Terdapat beberapa alasan petani melakukan diversifikasi tanam. Pertama, petani membutuhkan modal yang cukup besar untuk menanam tembakau sehingga harus berutang pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama untuk proses pasca panen. Sementara jenis tanaman lain tidak memerlukan terlalu banyak modal. Kedua, prosedur yang cukup panjang saat menanam tembakau. Ketiga, beban psikis dirasakan petani saat menanam tembakau karena kelelahan, kurang istirahat, dan hasil penjualan

yang tidak sesuai dengan harapan. Keempat, tata niaga yang tidak sehat dan proses yang terlalu panjang dari pengepul kecil, pengepul besar, *grader*, hingga masuk ke gudang. Selain itu, tarif yang harus dibayar dalam rantai tersebut diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, potongan tembakau kering, potongan tengkulak, potongan timbangan, dan beberapa sampel tembakau tidak dihitung sebagai barang penjualan.

B. Tantangan Diversifikasi Tanam

Ketika musim kemarau, petani menanam tembakau dengan tumpang sari berbagai jenis tanaman non-tembakau, seperti cabai, kacang merah, alpukat, tomat, kopi, ketela, wortel, kubis, bawang merah, terong, sawi, dan kacang merah atas inisiatif sendiri (Gambar 1).



Tanaman	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Tembakau												
Padi												
Kacang - kacang												
Umbi												
Cabai												
Sayur - sayuran												
Kopi												
Potensial tanaman diversifikasi												
Strawberry												
Jeruk												
Kentang												
Wortel												

Gambar 1. Kalender Masa Tanam Tembakau dan Komoditi Lain

Beberapa tantangan yang dihadapi petani dalam optimalisasi lahan dengan diversifikasi tanaman adalah:

1. Minimnya ketersediaan air, terutama saat musim kemarau dan belum ada embung untuk pengairannya;
2. Cuaca yang tidak mendukung, terutama jika kemarau terlalu panjang;
3. Tidak ada pangsa pasar yang pasti untuk komoditas hortikultura sehingga harga cenderung fluktuatif;
4. Minimnya ketersediaan benih tanaman alternatif;
5. Tidak mudah mencari tanaman pengganti.

C. Potensial Market Hasil Produk Tanaman Non-Tembakau

Strategi yang dilakukan oleh petani dalam memasarkan hasil tanaman non-tembakau, antara lain penjualan langsung, mengembangkan produk yang bernilai jual lebih, memanfaatkan bantuan dari pemerintah untuk izin usaha, hingga penjualan ekspor. Penjualan langsung dilakukan dengan menitipkan di toko-toko kecil, *supplier cafe*, dan penjualan secara *online*. Kopi Temanggung telah dipasarkan ke cafe di dalam maupun luar daerah, seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Depok, Jakarta, dan kota lainnya. Pengembangan nilai jual produk dilakukan mulai dari kopi *roasted*, bubuk kopi, dan pewangi. Sedangkan cabai dibuat menjadi sambal bubuk atau sambal wur, bayam menjadi keripik, kacang

merah dijadikan produk olahan dodol, wajik, tempe, isian mochi, dan onde-onde. Dalam pemasaran produk non-tembakau, pemerintah turut memperhatikan melalui adanya pelatihan inovasi produk dari Pemerintah Daerah (Pemda), pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) secara gratis, dan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) yang dipermudah. Selain itu, produk tanaman non-tembakau dari Temanggung juga masuk ke penjualan ekspor Belanda melalui diaspora. Upaya ekspansi *marketing* dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, penjualan dengan mobil keliling dan penjualan di toko oleh-oleh pada tempat pariwisata Temanggung. Kedua, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyerap, menstabilkan, dan memasarkan tanaman hortikultura. Ketiga, Program Semarak Ngopi Jumat yang ditetapkan sebagai Hari Minum

Kopi untuk mempromosikan produk kopi Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga sering mengadakan festival budaya dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daerah, proyek *food estate*, dan memperluas pasar dengan ekspor produk tanaman non-tembakau potensial. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menunjang pemasaran produk tanaman non-tembakau Temanggung, yaitu melalui pelatihan pengolahan produk hasil pertanian sesuai minat pasar, *unify branding* produk Temanggung agar lebih mudah dikenal, *workshop* pelatihan pemasaran menggunakan platform media sosial: *Tiktok*, *Instagram*, dan *Twitter*, serta bantuan sarana dan prasarana alat produksi dan pengemasan untuk usaha rakyat.



D. Bantuan untuk Diversifikasi Tanam

Bantuan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan telah diperoleh petani yang sudah bergabung dengan kelompok tani. Bagi petani yang tidak bergabung kelompok tani maka tidak mendapat bantuan pertanian apapun. Berdasarkan data Pemerintah Daerah, pendanaan DBH CHT digunakan untuk pelatihan, sosialisasi, dan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan hama penyakit hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan sebesar Rp186.236.000

Permasalahan DBH CHT untuk Diversifikasi Tanaman pada Tahap Perencanaan

- 1) **Prioritas pendanaan memerlukan komitmen dari Pemerintah Daerah**
"Penggunaan DBH CHT untuk dana kesejahteraan masyarakat dikembalikan lagi prioritasnya kepada daerah" (Kemenkeu).
- 2) **Masih minimnya alokasi dana untuk diversifikasi tanam**
"Pengajuan Rencana Kerja (Renja) masih memberikan persentase yang sedikit untuk diversifikasi tanam" (Kemenkeu, Kementan, Dinas Pertanian Kab. Temanggung)
- 3) **Terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan prioritas diversifikasi tanam**
"Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melibatkan berbagai pihak memungkinkan perbedaan pendapat untuk menjadikan program diversifikasi tanam sebagai prioritas daerah" (Dinas Pertanian).
- 4) **Kurangnya perhatian penggunaan dana SiLPA untuk diversifikasi tanam**
"Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) digunakan pada anggaran tahun berikutnya, dengan persentase sesuai dengan regulasi baru. SiLPA sangat berpeluang digunakan untuk diversifikasi tanam, namun kurang mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah" (Biro Ekonomi Setda).

kepada 25 orang. Bentuk bantuan yang telah diperoleh petani diantaranya bibit tanaman (kopi, alpokat, dan lainnya), alat pertanian (traktor, multifaktor, pompa air, dan lainnya), dan pelatihan peningkatan inovasi. Sementara, bantuan yang masih diperlukan oleh petani untuk diversifikasi tanam, yaitu bantuan air, khususnya di musim kemarau dengan bantuan ketersediaan embung, bantuan bibit dan tanaman alternatif, bantuan obat pengusir hama, prosedur pengajuan proposal yang tidak memakan waktu terlalu lama, serta bantuan pelatihan pengolahan dan penjualan dari hasil diversifikasi tanam.

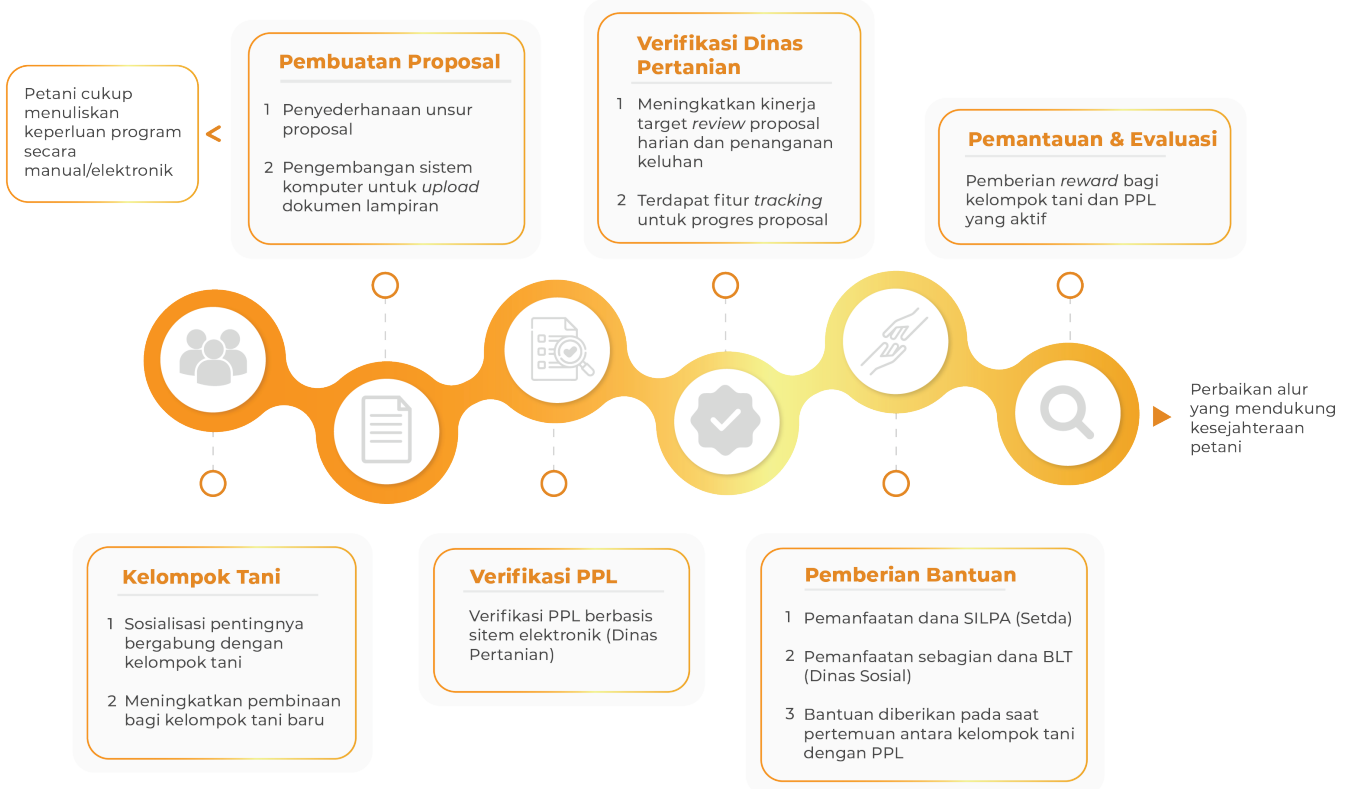
Permasalahan dan Usulan Solusi Penyaluran DBH CHT untuk Diversifikasi Tanam

DBH CHT disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung melalui Kelompok Tani. Kelompok tani terdiri dari kumpulan petani yang membentuk organisasi dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Permasalahan yang dihadapi pada penyaluran DBH CHT adalah:

- 1) Sebagian petani belum bergabung kelompok tani karena berbagai alasan;
- 2) Sebagian petani kesulitan membuat proposal dan minim informasi;
- 3) Verifikasi PPL dilakukan dengan melihat data di Simultan dan lapangan, setelah lolos proposal dirujuk ke Dinas Pertanian untuk verifikasi lanjutan, berkas rawan hilang atau rusak;
- 4) Proses yang memakan waktu cukup lama (>6 bulan);
- 5) Terdapat petani yang dimintai biaya untuk pengambilan bantuan dan tidak tepat sasaran; dan
- 6) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PPL dengan membuat laporan secara tertulis ke Dinas Pertanian. Solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut ditampilkan pada Gambar 2.





Gambar 2. Usulan Solusi Penyaluran DBH CHT untuk Diversifikasi Tanam

Dampak Ekonomi Diversifikasi Tanam

Diversifikasi memberikan dampak yang positif terhadap kondisi ekonomi keluarga petani. Beberapa dampak yang dirasakan petani adalah meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan sumber penghasilan, mengurangi jerat utang, dan meningkatkan penjualan bahkan hingga ekspor. Banyak petani yang kemudian mengembangkan pengolahan hasil produk diversifikasi, seperti kopi *roasted*, bubuk kopi, pengharum ruangan, dan lainnya, untuk mereka pasarkan sendiri melalui platform media sosial (*Instagram*), dan pengembangan promosi seperti pembuatan konten dan promosi melalui *video/reels*.



Kesimpulan

Petani tembakau menyadari bahwa hanya mengandalkan tanaman tembakau di musim kemarau tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun upaya diversifikasi tanam juga masih menghadapi beberapa tantangan (air, cuaca, pasar, benih). Pemahaman petani dalam diversifikasi tanam sudah cukup baik dengan adanya sosialisasi maupun pelatihan yang diberikan, baik mengenai metode dan jenis komoditi yang cocok untuk ditanam.

Aksesibilitas petani tembakau untuk mendapatkan DBH CHT untuk diversifikasi tanam masih minim disertai alur yang cukup rumit, dan masih perlu dikembangkan jenis bantuan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan. Efek produk hasil diversifikasi tanam yang memiliki nilai jual dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani sehingga kondisi kesejahteraan petani menjadi lebih baik.



Rekomendasi

Beberapa rekomendasi kebijakan dari hasil studi ini adalah:

- 1 Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi DBH CHT untuk diversifikasi tanam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau;
- 2 Kementerian Keuangan mendorong Pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan dana SiLPA DBH CHT untuk diversifikasi tanam;
- 3 Kementerian Keuangan mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tidak hanya untuk memberikan *reward*, tetapi juga untuk pemberdayaan petani dalam melakukan diversifikasi tanam;
- 4 Kementerian Pertanian memberikan bantuan embung yang efektif;
- 5 Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti oleh Pemda, menyederhanakan mekanisme alur pemberian bantuan DBH CHT untuk diversifikasi tanam;
- 6 Kementerian Pertanian serta Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pelatihan agar produk diversifikasi tanam lebih dekat dengan pasar;
- 7 DPR-RI dan Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah dalam implementasi alur DBH CHT untuk diversifikasi tanam yang lebih optimal.

Referensi

- Ahsan et al., 2022. *Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kesejahteraan Petani Tembakau*. UI Publishing
- Appau et al., 2019. *Why Do Farmers Grow Tobacco? A Qualitative Exploration of Farmers Perspectives in Indonesia and Philippines*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (30)

- Arfianto A. 2012. *Respon Petani Tembakau Terhadap Kegiatan Pengembangan Model Usahatani Partisipatif (PMUP) di Desa Tlahab Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 8(2), 105-117
- Damanhuri, et al., 2017. Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Sebagai Penguatan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, Tulungagung. *Cakrawala*, Vol 11(1), 35-36
- Kurdyś-Kujawska, A., Strzelecka, A. and Zawadzka, D., 2021. The impact of crop diversification on the economic efficiency of small farms in Poland. *Agriculture*, 11(3), p.250.
- Lencucha et al., 2022. *Tobacco farming: Overcoming an understated impediment to comprehensive tobacco control*. *Tobacco Control*;31:308-312
- Wijayani & Nanik. *Peningkatan Produktivitas Lahan Melalui Multiple Cropping dalam Upaya Mendukung Produk Olahannya*. *Senadimas*, 235-239
- Nurjihadi M, Dharmawan AH. 2016. *Lingkaran Setan Kemiskinan dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, hal 120-127
- Ratih et al., 2021. *Analisis Peluang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Alih Tanam*. PKJS UI
- Sahadewo GA et al., 2018. *The Economics of Tobacco Farming in Indonesia*. *Tobacconomics*
- Sahadewo GA, Drope J, Li Q, et al. *Tobacco or not tobacco: predicting farming households' income in Indonesia*. *Tob Control* 2021;30:320-7.

Tentang Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

(PKJS-SKSG UI) :

Institusi yang bergerak pada pelatihan, konsultasi, dan penelitian tentang Jaminan Sosial secara luas termasuk menangani isu ekonomi dan kesehatan untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

E-mail: csgs.pkjs@ui.ac.id
 Facebook: Kajian Jaminan Sosial UI
 Website: <https://pkjsui.org>
 Instagram & X: @pkjs_ui

